

Dalam lapangan ekonomi, kepentingan bangsa-bangsa Indonesia berbeda-beda pula. Keluasan daerah, perbedaan demography, melahirkan pula perbedaan-perbedaan kepentingan ekonomi. Apa jang penting untuk ekonomi Djawa, tidaklah mesti penting pula bagi kehidupan ekonomi Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya. Umpamanja persoalan ekonomi jang paling penting untuk Djawa sekarang ialah soal kekurangan tanah dan kekurangan pekerdjaan karena kepadatan penduduk. Sedang bagi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain, hal ini malah hampir-hampir tidak mendjadi soal sama sekali. Dalam pada itu tidaklah dapat dibantah bahwa pemindahan penduduk dari Djawa ke pulau-pulau itu akan menjusahkan penghidupan penduduk asli di pulau-pulau tersebut, menurunkan tingkat penghidupan mereka, menjusahkan mata pentjaharian mereka, karena datangnja persaingan tenaga buruh jang lebih murah. Djadi dalam soal pemindahan penduduk ini sadja terlibat dua kepentingan ekonomi jang bertentangan, jang keduanya tidaklah bisa diabaikan dan haruslah diatasi dengan persetudjuan kedua belah pihak, pihak penduduk asli dan pihak golongan pengungsi. Banjaklah kebidjaksanaan jang dapat diamhil guna mendjaga kepentingan kedua belah pihak itu, umpamanja dengan mengadakan sumber-sumber pekerdjaan baru di daerah-daerah jang bersangkutan, sehingga kedatangan kaum pengungsi tidak akan mendesak pentjaharian penduduk asli. Kalau tidak demikian, maka pemindahan penduduk itu hanja berarti

memperluas kemelaratan belaka.

Tetapi maksud kita jang terutama sekali dengan menarik perhatian pembatja kepada persoalan perbedaan kepentingan ekonomi ini disini, walaupun hanja setjara sepintas lalu, ialah untuk membuktikan bahwa persatuan Indonesia bukanlah satu persatuan jang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan ekonomi, atas kepentingan-kepentingan kebendaan *bagi segala pihak*, karena jang demikian itu tidaklah ada: tetapi persatuan Indonesia adalah berdasarkan suatu kepentingan jang lebih tinggi, yakni persatuan rohani, persatuan kedjiwaan jang berdasarkan pada agama Islam, pada *uchuwah Islamyah* jang mengikat lebih 90% dari bangsa-bangsa Indonesia satu denganlainnja. Persatuan Indonesia bukan berdasarkan pertimbangan kepentingan ekonomi, atau kepentingan kebendaan, karena apakah keuntungan ekonomi jang diterima oleh rakjat Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan lain-lain, jang menghasilkan kira-kira 90% dari wang masuk untuk pemerintah Sukarno di Djakarta, selain hudjan bom dan peluru?

Mengakui kenjataan Islam sebagai dasar persatuan Indonesia tidaklah berarti menjisihkan golongan-golongan rakjat Indonesia jang beragama Keristen atau Hindu, dan lain sebagainya, dari ikatan ke-Indonesia-an itu. Kalau agama-agama lain itu kebetulan tidak kuat kedudukannja di Indonesia sehingga tidak mengambil kedudukan sebagai kekuatan besar untuk mempersatukan seluruh Indonesia itu, maka mengapa pula perlu dihalangi

Islam untuk berbuat begitu? Bukankah hasilnya untuk kepentingan bersama juga? Faedah-faedah dari persatuan Indonesia dan dari berdirinya satu negara Indonesia yang besar itu tidaklah dimonopoli oleh umat Islam saja, tetapi terang-terangan juga dinikmati oleh golongan-golongan bangsa kita yang beragama Keristen, Hindu dan sebagainya. Dan kalau persatuan Indonesia tidak dapat didirikan maka golongan Keristen dan lain-lain itupun tentu turut juga mengalami kerugian-kerugiannya: Pada hemat penulis, walaupun golongan-golongan bangsa kita yang beragama Keristen, dan lain-lainnya, juga mempunyai kepentingan kebendaan dan kerohanian yang nyata-nyata atas tetap kuatnya pengaruh Islam di Indonesia, umpamanya dalam menghadapi musuh bersama: komunisme. Yang harus kita usahakan dengan persetujuan bersama, saling mengerti dan saling hormat-menghormati, ialah suatu susunan ketatanegaraan yang dapat menjamin persatuan Indonesia, yang menghormati hak golongan besar dan hak golongan kecil, yang mengakui kenyataan Islam sebagai dasar persatuan Indonesia tetapi juga sanggup menjamin kebebasan 100% kepada golongan-golongan Keristen, Hindu, dan sebagainya dalam lapangan keagamaan, kemasjarakatan, politik dan perekonomian. Usul-usul yang jelas mengenai ini akan kita kemukakan pada tempatnya nanti.

Professor Sebastian de Grazia dalam bukunya yang mengupas anasir-anasir ideologi yang dapat melemahkan dan meruntuhkan negara-negara telah mengemukakan

bahwa “dasar persamaan dan persatuan yang terpokok sekali dari sekalian warganegara ialah kejakinan atau agama mereka yang memperlihatkan dan menjatakan tjita-tjita mereka mengenai hubungan antara satu sama lain dan antara mereka dengan pemerintahnya. Dengan tiada kejakinan atau agama itu, dengan tiada dasar persamaan ini, maka bolehlah dikatakan bahwa masyarakat politik itu tidak ada.” (“The basic denominator of citizens is . . . belief-systems which express their ideas concerning their relationship to one another and to their rulers. Without them, without this fundament of commonness, no political community can be said to exist.” *The Political Community*, h. ix). Professor de Grazia selanjutnya mengemukakan bahwa mereka yang memandang ringan terhadap pengaruh agama biasanya dipengaruhi oleh alam-pikiran Karl Marx yang nyata-nyata salah itu, dan juga disebabkan dizaman damai dijalannya pengaruh agama itu tidak obahnya seperti dijalannya darah dalam tubuh manusia: mendalam dan diam-diam.

Agama bukanlah hanya soal perseorangan, sebagaimana disangka oleh kaum “rasionalis” abad ke delapan-belas, tetapi ialah soal perseorgangan-kemasjarakatan-dan-kenegaraan, sebagaimana telah dibuktikan sekarang dengan seterang-terangnya oleh ilmu masyarakat (sosiologi). Dengan mengenyampingkan Islam, maka Sukarno telah mengenyampingkan pula satu-satunya dan hanya satu-satunya tali ikatan antara rakyat Indonesia.

Perbuatan Sukarno ini, setjara langsung, telah membawa kepada perpetjahan dikalangan bangsa Indonesia jang kini sedang kita alami.

Sebelum meninggalkan atjara ini baiklah kita meninjau walau sedjenak tentang isi dari pantjasila Sukarno itu. Sebegitu djauh Sukarno belum pernah memberikan pendjelasan lebih landjut tentang "falsafah" pantjasilannya itu selain dari satu pidato jang diutjapkannya dizaman pendjadjahan Djepang jang sedjak beberapa waktu jang lalu sudah disiarkan oleh pengikut-pengikutnya dalam bentuk satu risalah ketjil dengan diberi nama "Lahirnja Pantjasila." Disana Sukarno telah menegaskan dengan tidak ragu-ragu lagi bahwa ia memaksudkan pantjasilannya itu sebagai satu "falsafah" bahkan sebagai "falsafah negara" Indonesia.

Tetapi dapatkah pantjasila itu dinamakan satu "falsafah"? Dibawah ini penulis akan mentjoba memperlihatkan bahwa pantjasila itu tidaklah dapat dinamakan satu "falsafah" apalagi satu "falsafah negara". Penulis tidaklah bermaksud untuk mengupas dan mengeritik isi keseluruhan dari pidato Sukarno jang dinamakan "Lahirnja Pantjasila" itu, tetapi hanya akan mengupas pokok-pokok jang penting sadja dari pidatonya itu. Mengupas isi keseluruhan dari pidato Sukarno itu akan membawa kita kembali kepada tingkatan pengantar ilmu negara dan ilmu politik, karena pidato itu mengandung begitu banyak kekatjauan pikiran mengenai masalah kenegaraan dan falsafah politik. Untuk meluruskan

semuanya akan memerlukan satu buku tersendiri, dalam tingkatan pengantar ilmu negara dan falsafah politik. Setjara ringkas dapat kita sebutkan bahwa pidato tersebut membuktikan kekurangan paham pengutjapnya mengenai arti dan hakikat dari pada falsafah itu; kekurangan pahamnya mengenai hubungan antara falsafah agama dengan falsafah politik; kekurangan pahamnya mengenai falsafah demokrasi, terbukti dengan dipakainya pemerintah Komunis Rusia dan pemerintah Nazi Djerman sebagai teladan jang mutlak bagi Indonesia dengan tiada sjarat dan ketjualinja, pada hal kedua-dua pemerintahan itu adalah pemerintahan diktator jang dipaksakan keatas pundak rakyat; kekurangan pahamnya tentang perbedaan antara mendirikan satu pemerintahan dengan mendirikan satu negara: Hitler di Djerman dan Lenin di Rusia tidaklah mendirikan *negara* Djerman dan *negara* Rusia baru tetapi mereka hanya mendirikan pemerintahan baru dengan tjara-tjara jang tidak menurut demokrasi dalam negara mereka masing-masing jang sudah lebih dahulu berdiri; disana persoalannya bukanlah mendirikan "negara" baru, sebagai soal jang dihadapi Indonesia pada waktu itu, tetapi hanya mendirikan "pemerintahan" baru bagi negara Djerman dan negara Rusia jang sudah terdiri, sudah diakui dan masih tetap diakui oleh dunia. Disana terlibat apa jang dalam hukum internasional disebut "pergantian pemerintahan" ("succession of government"), dan bukan "pergantian negara" ("succession of state"), sedang jang kita hadapi adalah soal jang terakhir. Karenanya persoalan kita sangatlah berbeda dari personalan jang

pertama dan tidak dapat isamakan begitu sadja.

Untuk mengetahui dapatkah pantjasila itu dinamakan satu falsafah, marilah kita memeriksa lebih dahulu apakah jang dimaksudkan dengan falsafah itu. Walaupun falsafah itu dalam perkembangannya sampai pada zaman ini sudah meliputi lapangan jang luas sekali dengan tjabang-tjabangnya jang bermacam-macam pula, seperti adanya falsafah agama, falsafah negara, falsafah sedjarah, falsafah hukum, falsafah ilmu, dan sebagainya, namun demikian, kita dapat menerangkan setjara ringkas bahwa jang dimaksudkan dengan falsafah itu ialah buah pikiran jang berisi jawaban jang terachir terhadap segala persoalan kehidupan manusia didunia ini. Falsafah menudjukan perhatiannya pada pertanyaan jang terachir dan jawaban jang terachir pula. Jawaban jang terachir berarti jawaban jang tegas-tegas, jawaban jang pasti-pasti, jawaban jang tidak samar-samar dan jang mengambil sikap jang tentu-tentu dalam persoalan jang dihadapinya. Dalam hubungan ini dapatkah pantjasila itu dinamakan satu falsafah? Adakah pantjasila memberikan jawaban jang terachir, jawaban jang pasti-pasti terhadap persoalan-persoalan jang dihadapinya, atau jang dipersoalkannya? Djauh panggang dari api! Sebenarnya sifat jang pertama dari pantjasila itu ialah kesamar-samarannya, ketiadaan ketentuannya, dan kehampaannya. Pantjasila bukan sadja tidak memberikan jawaban jang terachir dan pasti-pasti terhadap persoalan-persoalan kehidupan, tetapi malah menimbulkan lebih banyak

pertanyaan-pertanyaan jang tidak terdjawab dengan ditimbunkannya paham-paham jang saling bertentangan satu diatas jang lain, sehingga membuatnja sungguh-sungguh satu "falsafah" gadungan belaka.

Sering pula pantjasila itu disebut-sebut sebagai satu "ideologi" bahkan dikatakan "ideologi negara". Apakah sebenarnya jang dinamakan ideologi itu? Ideologi ialah suatu buah pikiran jang sudah lebih tegas lagi dari falsafah, suatu buah pikiran jang sudah mendjadi kejakinan dan tjita-tjita, jang berisi ajaran-ajaran jang pasti-pasti dan jawaban-jawaban jang mutlak terhadap masalah kehidupan manusia dalam dunia dan mungkin djuga sampai ke achirat, sebagai halnya dalam ideologi-ideologi agama jang diwahjukan, seperti Islam umpamanya. Professor Sebastian de Grazia telah menerangkan bahwa "ideologi itu tidaklah dibuat dari hanya satu bagian sadja, tetapi dirumuskan dari beberapa bagian jang *satu bagian dengan bagian lainnya disatu-padukan*, tegasnya suatu susunan kepertjajaan sebagai kita sering menjebutnja disini." ("... ideologies are not made of one piece but of a number of integrated parts, a system of beliefs, as they usually have been referred to here." *The Political Community*, h. 47). Kalau kita menilik kelima bagian dari pantjasila itu, maka dengan segera akan ternjatalah bahwa jang satu dengan jang lainnya djauh dari bersatu-padu, bahkan mengandung bibit-bibit pertentangan jang bagaimana penjelesaiannya tidaklah diterangkan sama sekali dan dalam keadaan pertentangan itu bagian

manakah pula jang lebih penting dari bagian-bagian lainnja tidak djuga diterangkan.

Sekarang marilah kita tindjau kelima dasar pantjasila itu satu-persatu. Kelima-lima dasar itu rupanja tidaklah mempunyai nilai jang tentu-tentu sehingga boleh digeserkan kesana-kemari menurut kesukaan masing-masing orang. Pada waktu Sukarno mengemukakan pantjasilanjanya untuk pertama kali, maka kita lihat, umpamanja, dasar ketuhanan jang maha esa diletakkan dinomor jang terachir sekali, yakni pada nomor lima. Sekarang dasar nomor lima ini rupanja sudah digeser kenomor satu. Dasar-dasar jang lainpun mengalami penggeseran-penggeseran jang demikian djuga. Kini marilah kita bitjarakan dasar Ketuhanan Jang Maha Esa itu.

Bahwasanja jang disebut dasar Ketuhanan Jang Maha Esa itu adalah satu "dasar" jang sangat kabur sekali dan tidak mempunyai arti jang tentu-tentu, sudahlah sering dikemukakan orang. Seribu satu tafsiran dapat diberikan atasnja. Sebenarnja dengan dipaksanja kita menerima "dasar" ini, maka Ir. Sukarno telah menarik mundur paham keagamaan kita kezaman djahilijah, malah kezaman sebelum-djahilijah ("pre-djahilijah"), kezaman sebelum lahirnja Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Chalilullah, kezaman dikala manusia masih mentjari-tjari hakikat ke-Tuhanan, kezaman dikala manusia masih belum dapat memikirkan dan belum diwahjukan tentang kesatuan Tuhan itu. Djalan jang ditempuh oleh paham

keagamaan dalam menudju kesempurnaannja ialah dari penjembahan berhala, kepada penjembahan alam, kepada penjembahan Tuhan jang samar-samar jang disebutkan dengan ketuhanan jang maha esa itu, kepada beberapa Tuhan dan achirnja barulah kepada satu Tuhan, jang mentjapai puntjak ketegasannja dalam agama Islam. Untuk menghilangkan segala keragu-raguan tentang sifat kesatuan Tuhan itu satu surat Al Quran sengadja diturunkan untuk menegaskannja:

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ »

"Katakanlah bahwa Allah itu satu; Allah jang kekal abadi; Allah jang tidak beranak dan tidak diperanakkan; Dan Allah jang tidak ada siapapun jang sama dengannja".

Dalam perkembangan falsafah agama kita memang pernah bertemu dengan suatu golongan dizaman pre-djahilijah jang karena kesamar-samaran pikiran mereka tentang ketuhanan itu, mereka telah memakai kata-kata "ketuhanan jang maha esa" itu untuk menundjukkan kepada tuhan mereka; tetapi tuhan jang mereka maksudkan itu tidaklah mesti satu dan bersifat sebagai Tuhan jang dalam paham Islam, Keristen atau Jahudi kemudiannja. Golongan itu ialah pengikut-pengikut dari falsafah Stoicisme jang berkembang di Junani disekitar tahun 200 sebelum Nabi Isa, atau kira-kira 800 tahun sebelum lahirnja Nabi Besar Muhammad s.a.w. Dengan tidak mengurangi arti kemajuan paham keagamaan

kaum Stoics ini untuk zaman mereka sendiri, paham ketuhanan mereka tidaklah memenuhi maksud-maksud dari falsafah keagamaan yang perlu memberikan jawaban yang tegas terhadap kedudukan atau "status" manusia didunia dan hubungannya dengan Tuhan. Walaupun kaum Stoics menjebut-njebut ketuhanan yang maha esa, paham ketuhanan mereka itu tidaklah benar-benar berdasarkan pada kesatuan Tuhan, atau yang kita sebut Tauhid dalam Islam. Paham ketuhanan mereka itu hanya merupakan suatu bentuk yang lain dari pada pantheisme, penjembahan alam yang menghubungkan zat ketuhanan dengan zat alam. Seorang penjair telah menggambarkan keluh-kesahnja tentang sifat ketuhanan yang maha esa dari kaum Stoics itu dengan sjair berikut:

A god to whom I cannot pray
Pray, what is he to me?
Mont Blanc is he, or star afar,
Pentelic marble, Tigris clay,
Or isle in southern sea.

("Suatu tuhan yang aku tak bisa berdo 'a kepadanya.
Berdo 'a, apakah ia bagiku?
Gunung Mont Blanc-kah ia, atau sebuah bintang
djauh diangkasa.,
Batu marmar Pentelic, atau tanah sungai Tigris,
Atau ia hanya satu pulau dilautan selatan?")
(Ernest Sihler, *From Augustus to Augustine*)

Sjair itu telah ditulis oleh seorang Katolik dalam

menentang paham ketuhanan yang maha esa yang kabur dari kaum Stoics itu. Dalam hubungan ini sikap golongan Katolik di Indonesia yang selama ini menjokong pantjasila, pada hemat penulis patutlah mendapat penindjauan kembali. Penulis yakin sikap membantu pantjasila yang diambil oleh golongan Katolik di Indonesia dan djuga oleh golongan Keristen yang lain selama ini bukanlah suatu pembenaran falsafah terhadap pantjasila itu, tetapi semata-mata suatu sikap politik dan berdasarkan pada apa yang dianggap kepentingan politik pada sesuatu waktu. Pada hemat penulis sudahlah waktunja bagi golongan-golongan Keristen di Indonesia untuk bekerjasama dengan ummat Islam dan mentjapai suatu saling mengerti dan harga-menghargai yang akan memadjukan kepentingan bersama, karena nasib dari golongan-golongan beragama dizaman ini lebih bergantung pada kekuatan bersama, dan bukan lagi sebagai dizaman yang silam.

Njatalah dasar ketuhanan yang maha esa dari pantjasila itu tidaklah dapat dinamakan suatu falsafah karena ia tidaklah memberikan jawaban terhadap persoalan ketuhanan dan keagamaan. Sebaliknya dipakainja dasar yang samar-samar ini dalam pantjasila tidak lain dari tempat melarikan diri dari pada menghadapi persoalan keagamaan yang sebenarnja yang ada dalam masyarakat Indonesia. Tetapi persoalan yang sebenarnja itu tidak akan lenjap hanya karena Sukarno tidak menjukainja atau tidak sanggup mengatasi atau

menjelaskanja. Persoalan keagamaan jang kita hadapi di Indonesia ialah bagaimana mengadakan satu susunan negara jang adil, dimana hak keagamaan dari ummat Islam jang berdjumlah lebih 90% dari rakjat Indonesia itu, dan hak keagamaan dari golongan Katolik, Protestan, Hindu dan jang lainnja jang kesemuanja berdjumlah kurang dari 10% dari rakjat Indonesia itu dapat dipenuhi, dengan tidak mengakibatkan ketidak-adilan terhadap hak sesuatu golongan agama itu, baik golongan terbesar, maupun golongan terketjil. Hal ini tidak bisa ditjapai dengan kompromi jang kosong atau kompromi jang tidak mempunjai dasar sebagai jang ditjobakan oleh pantjasila itu. Penjelesaiannya dapat ditjapai melalui ketertiban hukum sebagaimana akan kita bitjarakan pada tempatnja kelak.

Sekarang mari kita tindjau pula dasar jang lain dari pantjasila itu, jaitu dasar "nasionanisme", jang oleh Sukarno dalam pidatonja mengenai pantjasila jang kita sebutkan dibelakang ditempatkannya sebagai dasar pertama dari pantjasilannya itu. Tidak sjak lagi, nasionalisme adalah termasuk salah satu diantara paham-paham jang paling banjak diperdebatkan sedjak revolusi Perantjis samapai dewasa ini. Ratusan buku sudah ditulis orang dalam berbagai bahasa mengupas arti nasionalisme itu. Oleh karena itu kita tidak perlu mengambil bagian lagi dalam memperdebatkan apakah arti nasionalisme itu, tetapi kita akan memusatkan perhatian kita disini untuk menerangkan tentang apa jang *bukan-nasionalisme* itu.

Demikian djuga kita akan memperlihatkan betapa tidak perlunya nasionalisme itu, lehbih-lebih lagi "nasionanisme pura-pura".

Lebih dahulu kita ingin mengemukakan bahwa nasionalisme itu bukanlah patriotisme. Jang kita perlukan untuk mendirikan negara ialah patriotisme dan bukan nasionalisme. Patriotisme ialah semangat tjinta kepada tanah air dan bangsa jang berpangkal pada perasaan kesediaan mempertahankan diri sendiri jang dalam pertumbuhannya dirasakan mendjadi kewadajiban sutji jang dalam pelaksanaannya mungkin terlibat pengorbanan diri sendiri. Inilah jang dimaksudkan oleh Lord Acton ketika dikatakannya bahwa "patriotisme itu terdiri dari perkembangan rasa membela diri mendjadi kewadajiban moral jang mungkin terlibat pengorbanan diri sendiri." ("Patriotism. . . consists of the development of the instinct of self-preservation into a moral duty which may involve self-sacrifice." *The History of Freedom and Other Essays*, h. 293). Patriotisme selamanya bersifat mempertahankan diri, bersifat "passive"; tetapi nasionalisme selalu bersifat menjerang, "aggressive". Nasionalisme membagi-bagi machluk manusia dalam golongan-golongan jang mutlak jang tidak bisa diatasi, dimana golongan sendiri dianggap diatas dari segala kesalahan, lebih-lebih dalam persengketaan dengan golongan jang lain; paham jang membenarkan slogan "benar atau salah negeriku sendiri" tidaklah mengakui adanya hukum dan keadilan diatas bangsa itu. Dakwaan dari propagandis-propagandis

nasionalisme bahwa nasionalisme tjorak mereka sendiri tidaklah bersifat "chauvinistic" dan sebagainya, tidaklah obahnja dengan perdebatan dikalangan negara-negara besar jang membuat bom atom dewasa ini jang mendakwakan bahwa masing-masing mereka telah berhasil membuat bom atom jang "bersih" dan bukan bom atom jang "kotor". Tetapi "bersih" atau "kotor", namum bom itu masih tetap bom atom djuga jang tenaga pemusnahannya tidaklah terlalu berkurang karenanja. Demikianlah djuga halnja dengan propagandis-propagandis nasionalisme jang sibuk memperdebatkan "sjarat-sjarat" dari nasionalisme mereka. Achirnja jang terpenting dalam politik bukanlah apa jang disebut dalam teori, tetapi apa jang terdjadi dalam kenjataan. Maka sedjarah telah memperlihatkan kepada kita belum pernah ada satu negara jang berdasarkan pada nasionalisme itu pernah hidup kekal dalam perdamaian. Segala negara jang berdasarkan nasionalisme itu berachir mendjadi penjerang dan hantjur dalam peperangan. Demikianlah nasibnja Perantjis-nja Napoleon, Djerman-nja Bismarck atau Hitler, dan Italia-nja Mussolini. Sebenarnja belum pernah ada negara-negara besar di dunia jang didirikan atas dasar nasionalisme. Memang sudah sewadjarnjalah demikian, karena satu-satu bangsa hanja memduduki satu bagian ketjil sadja dari permukaan bumi, dan kalau negara-negara itu harus didasarkan atas nasionalisme, maka mustahillah dapat didirikan negara-negara besar, karena tiap-tiap negara besar berarti ikutnja lebih dari satu bangsa dalam pembentukannya. Dan dalam negara-

negara dimana terdapat lebih dari satu bangsa, maka nasionalisme mustahil dapat didirikan. Maka kita lihatlah misalnja negara-negara besar dizaman jang silam, seperti keradjaan Roma, keradjaan Byzantium, keradjaan Islam, semuanya tidaklah berdasarkan nasionalisme. Di zaman modern-pun negara-negara besar tidaklah ada jang berdasarkan nasionalisme. Maka kita lihatlah umpamanja, keradjaan Inggeris, Amerika Serikat, dan Soviet Rusia bukanlah negara-negara jang berdasarkan nasionalisme.

Dahulu, dizaman pemerintahan militer Djepang, Sukarno telah berani menjatakan keragu-raguannya terhadap kedudukan Islam di Indonesia. Sekarang, dibawah pemerintahan militer Sukarno, bolehkah penulis begitu berani pula untuk meragu-ragukan kedudukannya "nasionalisme Indonesia" jang selama ini mendjadi mata pentjaharian Sukarno sendiri? Walaupun penulis tidak bermaksud untuk memaksa pembatja buat menerima pendapatnja, setidak-tidaknja barangkali penulis dapat mengadjak pembatja walau sedjenak untuk bersama-sama merenungkan beberapa kenjataan dalam kehidupan politik kita. Untuk menghindarkan salah paham, sekali lagi penulis ulangi apa jang sudah penulis uraikan dibelakang, bahwa untuk mendirikan negara, kita memerlukan patriotisme, tetapi tidaklah memerlukan nasionalisme. Oleh karena itu, untuk mendirikan negara Indonesia jang kita perlukan ialah patriotisme Indonesia jang sudah njata-njata dibuktikan adanya oleh perjuangan nenek mojang kita dalam memperjahankan kemerdekaan

tanah air kita dimasa dahulu, dan oleh kita sendiri dalam merebut kembali kemerdekaan kita dizaman ini. Djadi andainja kupasan kita nanti benar-benar membuktikan bahwa apa jang digembar-gemborkan selama ini sebagai "nasionalisme Indonesia" itu, lebih-lebih oleh mereka jang telah berhasil membuatnja sebagai sumber nafkah pentjaharian hidup, ternjata tidak ada sama sekali, maka hal ini tidaklah mengurangi persatuan Indonesia, asal didirikan atas dasar keadilan. Sebenarnja" hilangnja "sesuatu jang memang tidak pernah ada itu tidaklah mempengaruhi kehidupan kenegaraan kita, karena kita sudah dapat "hidup bersama" sebegitu djauh dengan ketiadaannja. Jang rugi bukanlah kita anggota-anggota dari keluarga bangsa-bangsa Indonesia, tetapi pemain-pemain wajang jang akan segera kehilangan topengnja.

Ahli ilmu sosiologi, Franz Oppenheimer, telah menjatakan dengan tepat sekali bahwa "kita tidaklah dapat mengambil kesimpulan tentang adanja kesadaran kebangsaan itu dari adanja bangsa, tetapi sebaliknya kita harus mengambil kesimpulan tentang adanja bangsa itu dari adanja kesadaran kebangsaan." ("Wir müssen nicht aus der Nation das Nationalbewusstsein, sondern umgekehrt aus dem Nationalbewusstsein die Nation ableiten." *System der Soziologie*, djilid I. h. 6). Djadi kuntji untuk membuktikan adanja bangsa dan dengan sendirinja djuga adanja sesuatu nasionalisme itu bukanlah pada adanja dakwaan-dakwaan atau slogan-slogan dari

orang-orang jang mempunjai kepentingan ekonomi pada adanja sesuatu nasionalisme itu, tetapi pada ada atau tidaknja *kesadaran kebangsaan* itu dikalangan orang-orang jang didakwakan sebagai satu bangsa itu. Untuk mengetahui ada atau tidaknja kebangsaan dan nasionalisme Indonesia itu, jang perlu kita selidiki bukanlah apa jang dikatakan oleh Sukarno atau orang-orang jang sematjamnja, tetapi jang perlu kita selidiki ialah kenjataan-kenjataan jang tegas tentang adanja kesadaran kebangsaan dan adanja nasionalisme Indonesia itu dikalangan suku-suku bangsa Indonesia atau tidak.

Tadi telah kita singgung bahwa dalam negara-negara besar jang warganegarannya dengan sendirinja terdiri lebih dari satu bangsa, baik berupa beberapa bangsa atau berupa beberapa suku bangsa, maka negara-negara besar itu tidaklah dapat didasarkan atas dasar nasionalisme, jang memaksakan kesatuan jang mutlak itu, karena dalam negara-negara jang demikian satu nasionalisme tidak mungkin dapat diadakan atau dihidupkan. Dalam negara jang demikian, nasionalisme akan membawa perpetjahan dan achirnja akan meruntuhkan negara itu sendiri, karena djika sesuatu golongan bangsa menghidupkan nasionalismenja, maka jang lainpun akan berbuat demikian pula, sehingga timbullah beberapa nasionalisme dalam satu negara. Sedang untuk mengadakan satu nasionalisme jang dapat meliputi semua golongan-golongan tidaklah mungkin, karena dalam soal nasionalisme itu orang tidaklah dapat berpura-pura.

Indonesia adalah satu negara besar jang demikian: satu negara besar jang terdiri dari keluarga bangsa-bangsa Indonesia jang masing-masing tidak dapat melupakan dirinja. Dalam keadaan jang demikian, kalau sesuatu suku bangsa itu menghidupkan "Nasionalisme"-nja, maka jang lainpun akan memberi reaksi jang demikian. Maka kita lihatlah misalnja, diwaktu suku bangsa Djawa dimasa jang achir-achir ini sangat membesar-besarkan Gadjah Mada-nja sebagai orang besar Indonesia, maka suku-suku bangsa jang lain-pun jang memang tidak dapat merasai kebesaran Gadjah Mada itu sebagai kebesaran mereka sendiri jang sungguh-sungguh, merekapun memberikan reaksi dengan merajakan pula hari-hari ulang tahun orang-orang besar mereka sendiri jang selama ini sudah dilupakan atau tidak begitu dihiraukan lagi. Maka kita lihatlah umpamanja; suku bangsa Batak merajakan kembali Singamangaradjanja, suku bangsa Minangkabau Huanku Imam Bondjolnja, suku Bugis Sultan Hasanuddinnja, dan sebagainya. Hal ini adalah suatu hal jang sudah sewadjarnja. Tetapi dasar ilmu djiwa dari pada tindakan-tindakan jang kelihatannja biasa sadja ini, mempunyai arti jang besar sekali karena hal ini membuktikan bahwa diantara keluarga bangsa-bangsa Indonesia itu tidak ada rasa "saling berbangga" jang sungguh-sungguh terhadap kebesaran masa jang silam, karena memang kita tidak mempunyai kesatuan sedjarah, suatu hal jang oleh ahli-ahli ilmu masjarakat dipandang sebagai satu sjarat jang terpenting bagi adanja sesuatu kebangsaan. Masing-

masing golongan masih tetap menganggap *hanja* orang-orang besarnja sendiri jang sungguh-sungguh besar dan tidak ada golongan jang dapat sungguh-sungguh bersikap adil terhadap semua dengan tidak lebih mementingkan kepentingan atau pandangan golongannja masing-masing ("ethnocentric"). Disini terlibat perasaan kemanusiaan jang sedalam-dalamnja dan sewadjarnja: seseorang manusia tentulah lebih menghargai orang-tuanja sendiri walaupun hina-dina dari pada orang-tua manusia jang lain walaupun gagah perkasa. Inilah diantara hal-hal jang ketentuannja haruslah diserahkan kepada masing-masing perseorangan dan masing-masing golongan, hal-hal jang tidak dapat dapat diputuskan dengan suara terbanyak atau dengan kekerasan sendjata. Hanja kepatuhan jang dapat dipaksakan dengan sendjata, tetapi tidak pernah kesetiaan.

Bahwa diantara keluarga bangsa-bangsa Indonesia itu tidak ada rasa kesadaran kebangsaan jang sesungguhnya lebih-lebih dapat diperhatikan disa'at-sa'at krisis, karena masa krisis-lah jang mendjadi batu udjian jang tidak ada duanja dalam menentukan kesetiaan manusia, baik setjara perseorangan maupun sebagai golongan-golongan. Maka kita lihatlah umpamanja, ketika terdjadi pertunmpahan darah di Maluku hanja suku bangsa Maluku sendirilah jang meratapi dan menderitai kesedihan itu, sedang seluruh Indonesia tak atjuh pada persoalannja. Pada umumnja suku-suku bangsa Indonesia itu tidaklah memperdulikan apa jang terdjadi sebelum suku bangsanja

sendiri terlibat dalam sesuatu keadaan krisis itu. Kita tidak memaksudkan ini sebagai satu kritikan, tetapi hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketika terdjadi pertumpahan darah di Sulawesi halnja demikian djuga. Pertumpahan darah di Atjeh menjusul. Keadaan yang kita gambarkan diatas tidaklah berubah. Jang bersusah pajah mentjari perdamaian hanya suku Atjeh sendiri, sedang mereka jang sukunja sendiri belum terlibat dalam pemberontakan terhadap Sukarno tidaklah menghiraukan apa yang terdjadi, walaupun pemuka-pemuka politik yang namanja memegang pimpinan politik untuk seluruh Indonesia. Hanya orang-orang Atjeh sendirilah yang menderita dan berkeluh kesah. Bahkan ketika Tentera "Nasional" Indonesia menembak mati hampir seratus orang penduduk kampung yang tiada berdosa di Tjot Djeumpa, yang terdiri dari kanak-kanak yang berumur 7 tahun sampai kepada orang-orang tua berumur 80 tahun, anggota-anggota Tentera "Nasional" Indonesia yang telah melakukan kekedjaman itu, djangankan dihukum, dihadapkan kepengadilan sadjapun tidak. Pada hal kita masih ingat walaupun tentera Israel yang menembak beberapa orang Arab dalam pertempuran Suez ditahun 1956 masih di hukum oleh pemerintahnja. Kekedjaman yang sebiadap itu hanya bisa terdjadi karena anggota-anggota Tentera Nasional Indonesia yang melakukannja - yang terdiri dari suku lain itu - memang tidak merasa bahwa yang dibunuhnja itu adalah bangsanja sendiri. Sedang sikap pemerintah pusat yang membenarkan perbuatan itu, dengan tiada menghukumnja, adalah

mentjerminkan isi hati yang sama. Ketika persoalan penderitaan rakyat Atjeh itu dibawa ke Parlemen oleh anggota-anggota Parlemen dari Atjeh, anggota Parlemen yang terdiri dari suku-suku bangsa yang lain yang suku bangsanja belum terlibat dalam pertumpahan darah yang sudah terdjadi itu, bersorak-sorak mengetawakan, mengutuk dan mengantjam wakil dari Atjeh yang meminta perhatian mereka terhadap kekedjaman-kekedjaman yang telah dilakukan terhadap rakyat Atjeh itu. Apa yang terdjadi diatas bukanlah suatu komidi, tetapi suatu tragedi, suatu saat kebenaran, suatu "moment of truth", yang memperlihatkan tjorak dan hakikat dari kebangsaan Indonesia itu, suatu kebangsaan yang tidak mempunyai perasaan saling bersimpasî dan belas-kasihan antara satu sama lain; suatu kebangsaan yang tidak merasai kebanggaan dan kehinaan bersama, suatu kebangsaan yang tidak merasai kesenangan dan kesedihan bersama, tegasnja suatu bangsa yang tidak mempunyai "collective pride and humiliation, pleasure and regret," yang oleh John Stuart Mill dikatakan sebagai sjarat yang terutama sekali bagi adanja sesuatu kebangsaan dan sesuatu nasionalisme. Oleh karena itu nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme pura-pura belaka.

Dengan terlibatnja hampir seluruh suku-suku bangsa yang bukan Djawa dalam pemberontakan terhadap pemerintah Sukarno dewasa ini, kehampaannja nasionalisme Indonesia ini semakin mendjadi lebih njata lagi. Maka kita lihatlah walaupun pertumpahan darah

ini sudah sedemikian meluasnja, namun Sukarno masih tidak mau mengakui bahwa jang sedang terdjadi sekarang adalah satu perang saudara. Sikap ini hanja mungkin diambilnja karena Sukarno dan kawan-kawannja tidaklah menganggap suku-suku bangsa jang telah dipaksakan olehnja sendiri untuk menuntut keadilan dengan sendjata itu sebagai bangsanja sendiri jang djuga mempunjai hak bersuara dalam menentukan keadaan di Indonesia sebagaimana dia sendiri. Menurut alam pikiran ini, bagi Sukarno belum akan ada perang saudara di Indonesia kalau pertumpahan darah belum terdjadi pula didaerah Djawa Tengah, tegasnja daerah suku bangsanja sendiri. Dalam pada itu kita lihat pula betapa Sukarno sendiri sebagai "bapa dari nasionalisme Indonesia itu djustru pada saat seluruh Indonesia sedang berkubang darah, dan djustru pada saat berdjuta-djuta rakjat Indonesia sedang mengalami penderitaan lahir dan batin sebagai akibat dari politik sesat Sukarno sendiri, djustru pada saat jang sebagai ini Sukarno bukan berusaha mentjari penyelesaian tragedi jang dibuatnja sendiri, tetapi ia mempunjai ketenteraman djiwa untuk pergi melantjong-lantjong keseluruh dunia mengumpulkan souvenir, sedang Angkatan Udara "Nasional"-nja menghudjankan bom dan peluru terhadap rakjat jang tidak berdaja di Minangkabau, Minahasa, Batak, Atjeh, Maluku, Pasundan, dan berbagai pelosok Indonesia jang lain. Dapatkah semua ini terdjadi kalau memang kesadaran kebangsaan Indonesia itu ada, lebih-lebih dalam hati Sukarno sendiri? Dapatkah Sukarno dan kakitangannja bertindak sebagai

sekarang kalau mereka benar-benar berhati nasionalis Indonesia dan bukan berhati sesuatu nasionalis jang lain? Demikianlah dialam kenjataan, Indonesia adalah satu bangsa dimana ratap-tangis satu golongan mendjadi ketawaan golongan jang lain; dimana orang-orang jang dianggap pahlawan oleh satu golongan dianggap pengchianat oleh golongan lain; dimana kekedjaman terhadap satu golongan dipandang keadilan oleh golongan lain; dimana "solidariteit nasional" hanja ada di bibir dan di poster-poster sadja. Njatalah dialam kenjataan kesadaran kebangsaan Indonesia jang sesungguhnya tidaklah ada, dan jang disebut "nasionalisme Indonesia" itu hanja nasionalisme sesuatu golongan jang terbesar jang mempertopengkan nama "nasionalisme Indonesia" itu untuk membenarkan dan mengesahkan ("legitimatie") kekuasaannja.

Achirnja perlu kita peringatkan pula bahwa sesuatu nasionalisme itu tidaklah bisa hidup dan tidaklah bisa diadakan dengan tiada latar belakang keuntungan ekonomi bagi *semua golongan* jang menganutnja. Dalam hubungan ini perlulah kita bertanja: apakah ada latar belakang ekonomi jang dapat menjokong satu nasionalisme Indonesia itu? Djawaban kita: tidak ada. Karena dengan mengakui adanja satu nasionalisme Indonesia, sebenarnja sekalian suku-suku bangsa jang bukan Djawa telah menjerahkan diri dan kekajaan ekonomi mereka bulat-bulat kepada suku bangsa kita jang terbesar itu, jang berkat hukum suara terbanjak, memegang kekuasaan

politik dan ekonomi atas seluruh suku-suku bangsa jang lain di Indonesia. Dengan demikian jang mendapat keuntungan ekonomi dari adanja satu nasionalisme Indonesia itu hanja satu golongan sadja, yakni suku bangsa Djawa, sedang suku-suku bangsa jang lain itudjangan mendapat keuntungan ekonomi jang baru, mereka malah kehilangan segala keuntungan ekonominja jang ada. Djadi tidaklah mengherankan kalau kita melihat bahwa kalangan suku bangsa Djawalah jang sangat berkeras sekali untuk menghidupkan satu "nasionalisme Indonesia" itu, dan kebanyakan "kaum nasionalis" itu terdapat di Djawa Tengah. Tetapi suatu nasionalisme Indonesia jang hanja menguntungkan satu golongan sadja, dan merugikan golongan-golongan jang lain, bukanlah satu nasionalisme Indonesia jang sesungguhnya, dan nasionalisme jang sematjam itu tidaklah adil dan tidaklah akan dapat dipertahankan.

Njatalah kita tidaklah mempunyai latar belakang ekonomi atau alasan-alasan ekonomi untuk menjokong satu nasionalisme Indonesia. Tetapi ini tidak berarti bahwa dengan demikian kitapun tidak dapat mendirikan satu negara Indonesia jang adil. Dibelakang sudah kita tegaskan berkali-kali bahwa untuk mendirikan satu negara Indonesia jang adil kita sama sekali tidak memerlukan nasionalisme itu. Sebenarnya persatuan Indonesia hanja dapat diadakan atas dasar persatuan agama kita, atas dasar Islam, jang berdiri diatas segala perbedaan suku bangsa, diatas segala perbedaan kekajaan dan dibawah

Allah subnahu wa ta'ala.

Sekarang mari kita tindjau pula "dasar" pantjasila jang lain, yakni jang disebut oleh Sukarno dalam buku ketjil "Lahirnja Pantjasila" itu sebagai "internasionalisme", jang kemudian olehnja disamakan pula dengan dasar "peri-kemanusiaan". Dan achirnja dengan tidak ada pendjelasan apa-apa dan setjara gaib, istilah "internasionalisme" itu telah dibuang sama sekali dan diganti dengan istilah "peri-kemanusiaan" sadja. Disini kita berhadapan kembali dengan kesamar-samaran dan kekaburan alam pikiran Sukarno sehingga hampir-hampir tidak mungkin untuk menerka apa sebenarnja dalam hati ketjil Sukarno ketika diutjapkannya istilah-istilah itu. Tetapi Sukarno mempunyai kesederhanaan pikiran pula untuk mengatakan bahwa inipun adalah salah satu dari pada "falsafah"-nja. *O sancta simplicitas!*

Walaupun kita tidaklah bermaksud untuk bertindak sebagai djuru-pendjelas kekatjauan pikiran Sukarno, tetapi inginlah kita menundjukkan disini tanda-tanda jang menjatakan bahwa sebenarnja bagi Sukarno sendiri rupanja tidaklah begitu djelas dalam hatinja apa jang diutjapkannya. Dalam buku ketjil "Lahirnja Pantjasila" itu Sukarno telah menegaskan bahwa jang dimaksudkannya dengan "internasionalisme" itu ialah internasionalisme jang berdasarkan pada nasionalisme, tegasnja menurut alam pikiran kaum nasionalis jang sudah tjukup lumrah itu, jang menjamakan antara kedudukan bangsa-bangsa dalam masyarakat internasional dengan kedudukan

perseorangan dalam masyarakat nasional. Tetapi kalau demikian, bagaimanakah "internasionalisme" ini dapat disamakan pula dengan dasar "peri-kemanusiaan", karena dalam dasar peri-kemanusiaan itu terkandung pengertian jang memandang tiap-tiap perseorangan manusia itu, walau jang tidak berbangsa atau bernegara sekalipun, mempunyai kedudukan atau "status" jang tersendiri dan sama dalam hubungan internasional dan dalam hukum internasional. Dalam paham peri-kemanusiaan ini terlibat pengertian jang menentang atau setidaknya tidaknja jang memandang kebangsaan itu tidak perlu dan tidak mendjadi persoalan sama sekali, djadi bertentangan sekali dengan "internasionalisme" jang Sukarno sendiri menerangkan berdasarkan atas nasionalisme itu.

Tetapi pertentangan dan kekaburan pikiran Sukarno belum berachir sehingga itu sadja. Dalam dunia falsafah terdapat pula bermacam-macam falsafah jang pada umumnja dinamakan falsafah "peri-kemanusiaan" itu jang kesemuanja boleh dikatakan bertjorak anti-keagamaan. Pengikut-pengikut dari berbagai tjorak falsafah "peri-kemanusiaan" ini pada umumnja menganggap bahwa manusia tidaklah bertanggung djawab kepada Tuhan atas tingkah laku dan perbuatannja, tetapi bertanggung djawab pada dirinja sendiri. Salah seorang diantara mereka, Auguste Comte, malah mengusulkan satu agama "peri-kemanusiaan"-nja sendiri, jang diantara "rukun iman"-nja termasuk menjembah wanita. Apakah jang dimaksudkan oleh Sukarno dengan dasar "peri-

kemanusiaan"-nja itu merupakan tjangkokan dari salah satu paham-paham "bizarre" diatas, atautkah Sukarno mempunyai paham "peri-kemanusiaan"-nja sendiri pula, tidaklah diterangkannja. Segala-galanja mulai dan berachir di awang-awang.

Sekarang mari kita perbintjangkan pula dasar pantjasila jang keempat, jaitu keadilan sosial. Apakah jang dimaksudkan oleh Sukarno dengan keadilan sosial dalam pantjasila itu tidaklah didjelasannja. Sebagaimana kita tahu persoalan keadilan sosial itu sudah mendjadi pembitjaraan ahli-ahli falsafah sedjak ribuan tahun. Perpustakaan ilmu politik, ekonomi dan falsafah penuh dengan teori-teori keadilan sosial jang bermacam-macam dan tegas-tegas, berlainan dengan keadilan sosial pantjasila jang rupanja malah tidak mempunyai teori itu. Kita mempunyai teori keadilan sosial dari zaman Yunani jang dipaparkan oleh Plato dan Aristoteles; kita mempunyai teori keadilan sosial dari kaum Stoics; kita mempunyai teori keadilan sosial dari agama Keristen jang dibentangkan oleh St. Augustine dan St. Thomas Aquinas; kita mempunyai teori keadilan sosial dalam Islam jang diiringi dengan perintah jang mutlak untuk mengeluarkan zakat dan zakat fitrah untuk menolong mereka jang berhadjat. Dan achirnja ada pula teori keadilan sosial Karl Marx jang pada hakikatnja berdasarkan ke-tidakadilan itu, suatu "keadilan" sosial jang walaupun dalam teorinja bermaksud melahirkan "sjurga" kaum pekerdja itu, tetapi dalam kenjataanja melahirkan negara

perbudakan seperti Tiongkok Komunis dan lain sebagainya. Diantara bermacam-macam teori keadilan sosial yang saling bertentangan ini, manakah yang menjadi ikutan Sukarno dalam pentjasilannya? Ataukah Sukarno mempunyai teori keadilan sosialnya sendiri pula, dan kalau demikian bagaimanakah gerangan teorinya itu? Tetapi Sukarno tidaklah menerangkannya. Sebenarnya apa yang oleh Sukarno dikemukakan sebagai "falsafah" dalam pentjasilannya itu tidak lain dari pada slogan-slogan belaka yang Sukarno sendiri tidak mengetahui jalan mana yang hendak dipilihnya. Dan oleh karena dalam falsafah, keadilan sosial pada umumnya dapat berarti sistem yang berbeda-beda dan bertentangan, maka menjebut keadilan sosial saja sebagai dasar negara dengan tidak menerangkan maksud yang pasti-pasti dari kata-kata itu, sama saja halnya dengan tidak mengatakan apa-apa. Ini namanja bukan "falsafah" atau "berfalsafah" tetapi ketiadaan kesanggupan untuk berpikir.

Kini tibalah kita pada dasar pentjasila yang terakhir, yaitu "kedaulatan rakyat", yang oleh Sukarno pada mulanya diletakkan pada nomor tiga dari pentjasilannya dan yang dalam Undang Undang Dasar Sementara telah digeser pada nomor empat. Apakah yang dimaksudkannya dengan kedaulatan rakyat itu tidaklah ditegaskan oleh Sukarno dengan jelas. Sebagaimana terbukti dari *keadaan politik di dunia disekitar kita, dasar kedaulatan rakyat tersebut dapat diberi tafsiran yang bukan saja sesuai tetapi bertentangan.* Walaupun negara-

negara komunis yang memperkosa kedaulatan rakyat itu masih dapat menamakan dirinya "republik rakyat". Memang Sukarno juga menjebut-njebut bahwa kedaulatan rakyat ini berarti juga pemerintahan berdasarkan perwakilan. Tetapi pemerintahan yang berdasarkan perwakilan belum tentu melahirkan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan, kalau sistem perwakilannya tidak benar. Kalau sistem perwakilannya salah, maka pemerintahan yang berdasarkan perwakilan bukan melahirkan pemerintahan demokrasi yang sehat yang berdasarkan persetujuan, tetapi akan melahirkan pemerintah demokrasi kekerasan ("totalitarian democracy") dimana kekuasaan sendjata hanya diselubungi saja dibelakang tabir suara terbanjak yang mutlak, tepat sebagai apa yang sedang terjadi sekarang dalam negara kesatuan. Hal ini telah terjadi walaupun dalam pentjasila ada tertjantung dasar "Kedaulatan rakyat" itu, karena Sukarno memakai kata-kata "kedaulatan rakyat" dalam pentjasilannya itu hanya sebagai slogan belaka dan bukan sebagai falsafah yang mempunyai sistem yang lengkap, mempunyai tujuan yang tentu-tentu dan memberi jawaban yang tegas atas segala persoalan yang bersangkutan dengan teori itu.

Djadi njatalah, dari awal sampai ke akhirnya, pentjasila merupakan satu tugu kekatjauan pikiran yang tidak berhak dinamakan falsafah karena ia tidaklah memberikan jawaban yang terang dan jawaban yang terakhir atas satu persoalanpun; demikian juga pentjasila

tidaklah dapat dinamakan satu ideologi karena ia tidak berisi sesuatu tjita-tjita atau kejakinan jang tentu-tentu, demikian pula satu bagian dari pantjasila itu bertentangan pula dengan bagian-bagian lainnja. "Suatu ideologi jang didalamnja sendiri terpetjah-belah tidaklah dapat berdiri," kita Professor Sebastian de Grazia. ("... an ideology divided within itself cannot stand." *The Political Community*, h. 74). Sebenarnjalah pantjasila itu bukan suatu falsafah, bukan suatu ideologi, tetapi hanja suatu kumpulan slogan. Tetapi walaupun sebagai kumpulan slogan, pantjasila masih merupakan kumpulan slogan jang buruk, karena ia terdiri dari slogan-slogan jang kabur, tidak tegas, tidak terang, dan saling bertentangan. Njatalah pantjasila itu hanja pantas buat mendjadi "falsafah" hidup, atau mendjadi "Weltanshaung" bagi orang-orang bingung (ma'af).

B. Pemaksaan Negara Kesatuan Atas Satu Bangsa Bersuku

Kesalahan pokok jang kedua jang telah terdjadi dan jang Sukarno harus dipertanggung-djawabkan pula ialah pemaksaan suatu susunan pemerintahan jang tidak berdasarkan kenjataan sosial, politik, ekonomi, sedjarah, ilmu bangsa dan ilmu bumi Indonesia, jakni pemaksaan *negara kesatuan atas suatu bangsa bersuku* jang *suatu benua kepulauan*.

Tanah air kita Indonesia adalah suatu benua kepulauan jang terdiri dari kira-kira 3000 pulau dan meliputi permukaan humi sependjang 3000 mil. Djarak dari Sabang ke Marauke sama dengan dari London ke Baghdad, dimana terdapat tidak kurang dari 17 (tudjuh-belas) negara berdaulat! Dengan alat perhubungan kita jang ketinggalan zaman hampir satu abad dari benua Europah atau Amerika itu, maka keinginan Sukarno untuk memerintah seluruh Indonesia dengan segala kekuasaan berpusat padanja di Djawa tidak obahnja seperti seorang jang hendak memerintah seluruh permukaan bumi dari London ke Baghdad itu dari pulau Corsica. Njatalah, berdasarkan kenjataan alam itu sadja, keinginan Sukarno itu adalah suatu kemustahilan, walaupun pertimbangan-pertimbangan jang lain belum lagi kita perhitungkan.

Berlawanan dengan slogan jang didengung-dengungkan bahwa kita adalah "satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air," *dialam kenjataan* kehidupan kebangsaan kita tidaklah sesederhana dan semudah itu! Kenjataannja ialah bahwa bangsa Indonesia bukanlah suatu bangsa-tunggal, tetapi suatu *bangsa bersuku*; itupun kalau kita tidak hendak mengatakannja suatu kumpulan bangsa-bangsa Indonesia jang ilmu-ilmu ethonolgy, anthropology, philology dan sedjarah memang membuktikan kebenarannja. Bahkan perkataan "Indonesia" jang hanja berarti "kepulauan India" itu, tidaklah menundjukkan kebangsaan tetapi hanja suatu istilah jang menundjukkan suatu tempat di peta bumi, seperti kata-kata "Eropah",

"Canada", "Australia", "Amerika", dan lain sebagainya. Sebagaimana di Eropah tidak ada satu bangsa Eropah, tetapi jang ada ialah bangsa-bangsa Inggeris, Perantjis, Belanda, Djerman dan sebagainya; di Canada, tidak ada satu bangsa Canada, tetapi jang ada ialah bangsa-bangsa Inggeris dan Perantjis dan golongan-golongan ketjil jang lain; di Australia tidak ada satu bangsa Australia tetapi jang ada ialah bangsa Inggeris, bangsa Irlandia, bangsa Negrito dan lain sebagainya; maka di Indonesia pun tidak ada satu bangsa Indonesia dalam artian sedjenis bangsa, tetapi jang ada ialah *bangsa-bangsa Indonesia* jang terdiri dari bangsa Djawa, bangsa Sunda, bangsa Madura, bangsa Minangkabau, bangsa Bugis, bangsa Batak, bangsa Atjeh, dan seterusnya, jang masing-masing mempunjai sedjarahnja sendiri-sendiri, bahasa dan sasteranja sendiri-sendiri, adat-istiadatnja sendiri, bahkan nama dan gelarannja sendiri pula. Tuhan-lah jang telah membuat kita demikian.

Tidakkah Al Quran telah berkata:

« إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا... »

"Kami telah membuat kamu laki-laki dan perempuan dan mendjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu salin kenal-mengenal..." (Surat Al Hudjrat, Ajat 13.) Ribuan tahun sebelum kepulauan kita diberi nama Indonesia, nenek mojang kita sudah hidup dan menguasai kepulauan ini. Darah jang mengalir dalam tubuh kita, bahasa jang dipakai lidah kita, adat istiadat kita, semuanja bukanlah bikinan kita sendiri, tetapi pusaka jang kita terima dari mereka hasil dari

peradaban jang sudah dipelihara sedjak ribuan tahun, jang diterima oleh nenek-mojang kita dari nenek mojang mereka, dan diteruskan oleh nenek-mojang kita kepada kita, untuk kita teruskan pula kepada anak tjutju kita di hari-hari jang akan datang. Hanja orang jang terlalu malas berpikirlah jang bisa pertjaja bahwa dengan diberinja nama baru kepada kepulauan kita hanja beberapa puluh tahun jang lalu oleh seorang asing jang bernama Bastian, maka dengan sendirinja sedjarah masing-masing bangsa kita jang sudah dipelihara sedjak ribuan tahun itu sudah terhapus; nilai-nilai astra dan budaja jang telah dipupuk sedjak ribuan tahun oleh nenek mojang kita dengan tiba-tiba mendjadi tidak berharga lagi; malah darah jang mengalir dalam tubuh kita dan sifat-sifat kita se-akan-akan sudah bertukar mendjadi darah dan sifat manusia baru, manusia Indonesia, jang -sebelum Bastian pandai membatja dan menulis-belum pernah ada itu. Semua "mukdjizat" ini sudah terdjadi dalam satu malam berkat kata-kata keramat "Indonesia" - jang hangja berarti kepulauan India itu - jang ditulis oleh seorang asing jang bernama Bastian, diatas beberapa lembar kertas usang. Dalam satu malam, maka bangsa-bangsa Djawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Batak, Atjeh, Bugis, Minahasa dan lain-lain, telah lenjap, disunglap mendjadi satu bangsa Indonesia dengan satu bahasa dan satu tanah air itu. *Tetapi kenyataannja adalah djauh dari itu.* Suatu bangsa tidaklah dapat dibangunkan dalam satu malam. Pembangunan suatu bangsa, pembangunan suatu negara dan pembangunan suatu

pemerintahan adalah tiga persoalan jang sangat berbeda-beda. Inilah jang tidak dipahami oleh Sukarno sebagai ternjata dari pidatonja mengenai lahirnja pantjasila, dimana ia mentjampur-adukkan persoalan-persoalan diatas. Kita tidak mempunjai keberatan sama sekali terhadap slogan-slogan jang bisa dipakai untuk menolong mempererat persatuan antara bangsa-bangsa Indonesia, tetapi amatlah berbahaya kalau slogan-slogan jang kita buat sendiri itu sampai menipu diri kita sendiri dan sampai membuatnja sebagai suatu dogma, dan memakainja sebagai dasar ketatanegaraan, karena negara tidaklah dapat dibangun atas dasar slogan-slogan belaka. Slogan "satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air" itu tidaklah dapat mengeringkan Selat Sunda atau mengurangi air Laut Djawa walaupun satu tetes!

Tetapi tepat pada slogan-slogan kosong jang tidak berdasarkan kenyataan inilah negara kesatuan jang sekarang telah didasarkan. Undang Undang Dasar negara kesatuan sama sekali tidak mengakui sifat-sifat jang terutama sekali dari kebangsaan kita, yakni, bahwa Indonesia bukanlah suatu bangsa tunggal, tetapi suatu bangsa bersuku. Dengan tidak diakuinja suku-sukubangsa ini, maka dengan sendirinja diabaikan pula perwakilan mereka. Dengan diabaikannja perwakilan mereka, maka dilalaikan pula kepentingan mereka. Dengan dilalaikannja kepentingan mereka, maka Pemerintah Pusat di Djakarta bukan lagi suatu pemerintah bagi seluruh rakjat, oleh seluruh rakjat dan untuk seluruh rakjat, tetapi telah

bertukar mendjadi suatu pemerintah dari segolongan rakjat atas segolongan rakjat jang lain, suatu pemerintah oleh suku bangsa jang terbesar atas suku-suku bangsa jang terketjil, tegasnja kalau disalin kealam kenyataan politik Indonesia, suatu pemerintahan oleh suku bangsa Djawa atas suku-suku bangsa Indonesia lainnja. Hal ini telah terdjadi bukanlah karena kesalahannja suku bangsa Djawa - jang kita kenal ketjintaannja kepada keadilan itu, - tetapi diakibatkan oleh pemaksaan suatu susunan negara kesatuan dengan demokrasi "primitive"-nja atas suatu bangsa-bersuku jang telah dilakukan Sukarno dan pengikut-pengikutnja.

Keadaan ini sudah terlahir kealam kenyataan melalui saluran demokrasi "primitive", demokrasi adu-angka jang tidak dapat dipisahkan dari falsafah negara kesatuan. Demokrasi "primitive" inilah jang selama ini didjalankan oleh Sukarno dan pengikut-pengikutnja jang hasilnja - sengadja diperhitungkan atau tidak - adalah melahirkan "hegemon-", penguasaan oleh satu suku bangsa jang terbanjak atas nasib seluruh suku-suku bangsa jang lain di Indonesia.

Hal ini telah terdjadi antara lain, sebagai berikut: Oleh karena suku bangsa Djawa merupakan 51% dari djumlah warga negara Indonesia-djadi dalam demokrasi adu-angka merupakan angka jang terbanjak - maka *kekuasaan politik* dalam artian jang sesungguhnya, jang *menentukan* segala-galannja, "berkat" demokrasi primitive itu adalah 100% dalam tangan suku bangsa Djawa.

Tegasnja kekuasaan politik dibumi Indonesia sudah dipindahkan kedaerah Djawa Tengah dan sebagian Djawa Timur, sedang daerah-daerah Indonesia jang lain, dari Sabang sampai ke Marauke, sudah didjadikan daerah tandus politik, daerah kosong, jang nasibnja, hidup matinja, ditentukan di Djawa Tengah; sedang pemilihan-pemilihan jang dilakukan didaerah "seberang" lautan itu hanja berupa asal ada sadja, jang tidak ada nilai politiknja sama sekali, "formaliteit" belaka, atau propaganda sadja, untuk menipu rakjat "seberang" jang tidak memahami politik se-akan-akan dengan turutnja mereka dalam pemilihan merekapun sudah turut menentukan politik negara. Pada hal ikut atau tidaknja mereka dalam pemilihan, menurut tjara-tjara sekarang, tidaklah mempunjai pengaruh apa-apa atas politik Pemerintah Pusat jang didiktekan dari Djawa Tengah itu. Apa sadja jang dikehendaki oleh orang jang mempunjai pengikut terbanjak dikalangan suku bangsa Djawa itu, "demagogue" seperti Sukarno atau bukan, dapatlah dipaksakan keatas pundak seluruh rakjat Indonesia, walaupun rakjat Indonesia jang lain di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Madura dan Pasundan menolaknya, karena djumlah suara semua mereka ini, walaupun merupakan kurang lebih 49% dari rakjat Indonesia, masih djuga merupakan suara jang terketjil jang "harus" tunduk kepada suara terbanjak jang 51%. *Kalau Djawa Tengah dan sebagian Djawa Timur pada suatu hari dikuasai oleh kaum komunis, maka dengan sertamerta seluruh Indonesia akan dapat didjadi-*

kan satu negara komunis, menuruti "hukum-hukum" negara kesatuan jang sekarang, walaupun rakjat-rakjat Madura, Pasundan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara tidak menghendakinja. Djadi dengan demikian pintu sudah dibuka dengan selebar-lebarnja untuk meng-komunis-kan Indonesia melalui djalan "parlementer".

Dengan ini berartilah bahwa suku-suku bangsa Indonesia jang lain itu - jang bukan suku bangsa Djawa - bukan sadja telah tidak turut lagi menentukan politik negara dan pemerintah Indonesia, tetapi malah hak mereka untuk memerintah diri sendiri sudah hilang sama sekali, karena tjampur-tangannja Pemerintah Pusat dalam segala urusan pemerintah daerah. Dengan demikian suku-suku bangsa jang lain itu, pada hakikatnja sudah mendjadi warga negara kelas dua jang kedudukannja tidak lebih dari rakjat djadjahan. "Adalah suatu pengalaman sedjarah," kata Professor Harold Laski, "bahwa pengasingan sesuatu golongan dari kekuasaan, lambat laun berarti pengasingan golongan itu dari mengetjap faedah-faedah kekuasaan itu." ("... it is the experience of history that the exclusion of any group of men from power is sooner or later their exclusion from the benefit of power." *An Introduction to Politics*. h. 38).

Tetapi ketidak-adilan ini belum berachir sehingga itu sadja. Dalam pada itu kira-kira 90% dari wang-masuk negara Indonesia dikorek pula dari bumi suku-suku bangsa jang hak-hak politiknja sudah dirampas itu, sehingga mereka ini sebenarnja deradjatnja sudah turun

setingkat lagi mendjadi warganegara kelas tiga. "Sudah djatuh ditimpa tangga pula."

Ini baru sebagian dari akibat-akibat pemaksaan negara kesatuan dan demokrasi "primitive"-nja atas suatu bangsa bersuku. Kedua-duanja adalah anak kandung dari falsafah totaliter. Kedua-duanja memandang masjarakat dan negara sebagai terdiri dari sebegitu banjak manusia jang semuanja dapat dipersamakan demikian sadja dan kesemuanja mempunjai kepentingan-kepentingan jang sama pula. Tetapi sajangnja alam pikiran jang sederhana ini tidaklah sesuai dengan kenjataan kehidupan manusia, baik dalam masjarakat, maupun dalam negara. Sebagai Aristoteles sudah mengatakan lebih 2400 tahun jang silam, "negara tidaklah dibuat hanja oleh *sebegitu banjak* manusia jang sama, tetapi oleh *sebigitu matjam* manusia jang tidak sama; persamaan sadja tidaklah membuat suatu negara." ("A state is not made up of only so many men, but of different kinds of men; for similarities do not constitute a state." *Politics*, djilid II, bagian 2, 3.). Lebih-lebih dalam suatu negara seperti Indonesia jang meliputi seluruh bangsa-bangsa Indonesia jang mendiami suatu benua kepulauan itu, mestilah terdapat perbedaan-perbedaan nilai kehidupan, dan kepentingan hidup sebagai akibat dari perbedaan sedjarah, perbedaan suku bangsa, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, perbedaan pulau dan daerah, perbedaan agama dan budaja, dan terutama sekali perbedaan kebutuhan ekonomi. Kalau perbedaan kemanusiaan dan kealaman

ini ditenggelamkan dengan begitu sadja dalam lautan angka-angka, maka hasilnja bukanlah demokrasi tetapi penindasan oleh satu golongan terbanjak atas golongan-golongan terketjil, atau menurut istilah Alexis de Tocqueville: *le tyrannie de la majorite*.

"Semakin luas dan semakin banjaknja penduduk sesuatu negara," kata John Caldwell Calhoun, seorang ahli falsafah dan ahli negara Amerika, "maka semakin lebih berbeda-beda pula keadaan dan pentjaharian rakjatnja; dan semakin lebih kaja, lebih senang dan lebih berbeda-beda penduduknja, maka semakin lebih sukar pula untuk menjamakan tindakan pemerintah, dan semakin lebih mudah pula bagi sebagian dari masjarakat untuk menjalah gunakan kekuasaannja buat menindas dan merampas kekajaan bagian jang lain. . . . Golongan jang terbanjak mempunjai gelagat jang sama untuk menindas dan mempergunakan kekuasaannja dengan sewenang-wenang seperti radja-radja jang tidak bertanggung djawab; bedanja hanja radja-radja itu tidak mempunjai hak memilih. Sungguh tidak dapat diberikan alasan mengapa hanja radja-radja sadja jang bisa memerintah dengan sewenang-wenang dan mengapa jang demikian itu tidak berlaku djuga untuk golongan jang terbanjak. Golongan terbanjak, dengan melalui pemungutan suara, pada kenjataannja adalah radja-radja - pihak jang menguasai, jang memerintah dan jang tidak bertanggung djawab, - sedang mereka jang membuat dan mendjalankan Undang Undang pada hakekatnja tidak

lain dari pada wakil-wakil dan kaki-tangan dari pada golongan terbanjak itu." ("The more extensive and populous the country, the more diversified the condition and pursuits of its population; and the richer, more luxurious, and dissimilar the people, the more difficult it is to equalize the action of the government, and the more easy for one portion of the community to pervert its powers to oppress and plunder the other.... The dominant majority for the time would have the same tendency to oppression and abuse of power which, without the right of suffrage, irresponsible rulers would have. No reason, indeed, can be assigned why the latter would abuse their power, which would not apply with equal force to the former. The dominant majority for the time would, in reality, through the right of suffrage, be the rulers-the controlling, governing, and irresponsible power,-and those who make and execute the laws would, for the time, in reality be but their representatives and agents." *A Disquisition on Government*, h. 16, 22).

Calhoun selandjutnja memperingatkan kita akan bahajanja memaksakan suatu susunan pemerintahan jang berdasarkan angka terbanjak atas suatu negara jang sangat luas, jang berpenduduk berbeda-beda dan berkepentingan berlain-lain pula. Pemaksaan suatu pemerintahan jang berdasarkan adu-angka atas suatu negara jang demikian akan berachir dengan dimonopolinja keuangan negara oleh golongan jang terkuat; dengan berbeda-bedanja pengaruh undang-undang disuatu daerah

dengan daerah jang lain; dengan berbeda-bedanja akibat pajak diberbagai daerah jang luas itu; dengan diabaikannja kepentingan-kepentingan daerah jang kebetulan tidak sama dengan kepentingan daerah golongan terbanjak, dan achirnja pertentangan kepentingan antara seluruh daerah itu akan menimbulkan pertentangan-pertentangan jang tadjam jang akan mengakibatkan penindasan jang kedjam oleh golongan terbanjak atas golongan terketjil jang achirnja akan meruntuhkan negara itu sendiri.

Golongan jang mempunyai angka terbanjak tidaklah mewakili seluruh rakyat dan kepentingan golongan jang mempunyai angka terbanjak tidaklah mesti sesuai dengan kepentingan seluruh rakyat. Hal ini disebabkan, pertama, adanja perbedaan kepentingan jang njata-njata diantara berbagai daerah dan berbagai suku bangsa. Dalam suatu negara jang sebesar dan seluas ini tidak ada *satu* kepentingan rakyat, tetapi jang ada ialah *beberapa* kepentingan rakyat, yakni, "collective interests" - gabungan beberapa kepentingan - jang tidak terdiri dari hanya satu tetapi dari beberapa kepentingan jang tidak sama, jang kesemuanja haruslah dilindungi. Disinilah letaknja kesalahan dari teori politik Jean Jacques Rousseau jang pada umumnja mendjadi ikutan mereka jang hendak mendirikan pemerintahan demokrasi jang sewenang-wenang. Teori politik Rousseau, antara lain, berdasarkan pada anggapan adanja *satu* kepentingan rakyat jang dilahirkan oleh *satu* "kemauan umum", atau "volonté

générale", sebagai Rousseau menjabutnja, yakni satu-satunja kepentingan dan satu-satunja kemauan jang harus dituruti dalam sesuatu pemerintahan. Pada hal "kepentingan umum" dan "kemauan umum" jang disangka oleh Rousseau itu papa hakikatnja tidak lain dari pada kepentingan dan kemauan sesuatu golongan jang terbanjak dalam masjarakat, dan bukan kepentingan dan kemauan seluruh masjarakat. "Kemauan umum itu adalah suatu hal jang kabur sekali. . . ." kata Professor Laski. "Karena itu tidaklah mengherankan kalau apa jang biasanja kita sangka sebagai hasil dari pada kemauan umum dalam sesuatu keputusan dengan suara terbanjak achirnja ternjata sesungguhnya hanjalah penguasaan oleh sesuatu kepentingan sepihak jang kebetulan mempunyai angka terbanjak." ("The general will is such a vague thing. . . . No wonder, then, that what we have usually supposed to be the working of the general will in a majority decision turns out to be really the dominance of a certain partial interest which, for the time, happens to possess numerical strength." *Foundations of Sovereignty*, h. 238). Biasanja mereka jang bekerdja untuk kepentingan golongannya sendirilah jang mempunyai gelagat untuk menamakan kepentingan golongannya itu sebagai satu "kepentingan umum." Oleh karena itu kesalahan-kesalahan teori politik Rousseau langsung membawa kepada pendirian pemerintahan demokrasi jang sewenang-wenang, suatu penindasan oleh golongan terbanjak atas golongan terketjil. Teori politik Rousseau jang dituliskanja dalam bukunya *Contrat Social*, jang berdasarkan atas

pengadjiannya terhadap negara-negara demokrasi purbakala jang ketjil, sempit, seperti republik-republik Athena dan Sparta, dan paling achir kota Genevanja sendiri itu sebenarnja tidaklah lagi mempunyai kebenaran untuk zaman kita ini. Tetapi, sebagai dikatakan oleh Benjamin Constant, "Rousseau masih selalu sadja dikutip oleh mereka jang ingin mendirikan pemerintahan sewenang-wenang. Rousseau dapat dipakai sebagai topeng untuk pemerintahan sewenang-wenang karena Rousseau hanja mempunyai perasaan - "sentiment" - tentang merdeka dan ia tidaklah mempunyai teori dari kemerdekaan itu." ("Rousseau a toujours été cité par ceux qui ont voulu établir le despotisme. Rousseau a servi de prétexte au despotisme, parce qu'il avait le sentiment de la liberté, et qu'il n'en avait pas la theorie." *Cours de Politique Constitutionnelle*, h. 10).

Sebagaimana tidak adanja *satu* "kepentingan umum" dan *satu* "kemauan umum", maka demikian djuga tidaklah ada *satu* "kepentingan negara" jang berdiri sendiri, diatas dan terlepas dari berbagai-bagai kepentingan golongan-golongan rakjat. Negara adalah *alat* dari masjarakat, dan sebagai alat, maka negara tidaklah mempunyai tudjuan-tudjuannya jang tersendiri atau kepentingan-kepentingannya jang tersendiri diluar dari tudjuan dan kepentingan masjarakat jang melahirkannya.

Alasan jang kedua jang membuktikan bahwa golongan angka terbanjak itu tidaklah mewakili seluruh rakjat ialah karena golongan terbanjak terang-terangan tidak

mewakili kepentingan golongan terketjil. Menerima suatu pemerintahan jang mutlak dari golongan terbanjak sama dengan menganggap mereka sebagai *seluruh* rakjat dan *seluruh* bangsa, yakni menjamakan satu *bahagian* - walaupun bahagian jang terbesar - dari masjarakat sebagai keseluruhan dari masjarakat itu sendiri.

Njatalah suatu negara dan suatu pemerintahan jang dibangun atas dasar adu angka itu djauh dari suatu negara dan pemerintahan jang adil. Dasar ini sadja djauh dari tjukup untuk mendirikan suatu pemerintahan ber-Undang Undang Dasar jang sempurna. "Adalah sangat penting dalam suatu republik," tulis James Madison, salah satu diantara pengarang Undang Undang Dasar Amerika Serikat, "bukan sadja untuk mendjaga masjarakat dari penindasan pemerintahnja, tetapi djuga buat melindungi satu bagian dari masjarakat dari pada ketidak-adilan bagian jang lainnja. Perbedaan kepentingan dengan sendirinja timbul antara berbagai golongan warganegara. Djika suatu golongan terbanjak mendjadi bersatu oleh karena kepentingan bersamanja, maka hak-hak dari golongan ketjil akan tidak selamat. . . Keadilan adalah tudjuan terachir dari pemerintahan. Itulah pula tudjuan masjarakat manusia beradab. . . . Dalam suatu masjarakat dimana golongan terbanjak dapat dengan mudah bersatu dan menindas golongan jang lemah, maka boleh dikatakan kekatjauan akan timbul sebagai dizaman djahilijah, dimana orang jang lemah tidak selamant dari kekedjaman orang jang kuat. . . ."

("It is of great importance in a republic not only to guard the society against the oppression of its rulers, but to guard one part of the society against the injustices of the other part. Different interests necessarily exist in different classes of citizens. If a majority be united by a common interest, the rights of the minority will be insecure. . . . Justice is the end of government. It is the end of civil society. . . . In a society under the forms of which the stronger faction can readily unite and oppress the weaker, anarchy may as truly be said to reign as in a state of nature where the weaker individual is not secured against the violence of the stronger. . ." *The Federalist*, No. 51). Henry David Thoreou filosof Amerika itu, sudah mengemukakan pula kesimpulannja bahwa "suatu pemerintahan dimana golongan terbanjak jang memberi keputusan dalam segala hal, tidaklah dapat didasarkan pada keadilan." ("A government in which the majority rule in all cases cannot be based on justice" *Works*, dj. X,h, 131,170).

Memang dalam suatu pemerintahan demokrasi pengambilan keputusan dengan suara terbanjak tidaklah dapat dielakkan dalam segala bentuknja. Tetapi disinilah terletak perbedaannja. Pengambilan keputusan dengan suara terbanjak bukanlah hanja satu-satunja djalan untuk mentjapai demokrasi tetapi adalah satu diantara beberapa djalan jang lain. Pemakaian tjara pengambilan keputusan dengan suara terbanjak sadja tidaklah mesti menghasilkan demokrasi itu. Semuanja bergantung pada keadaan

masjarakat dan negara dimana tjara itu didjalankan, tegasnja ada *tempat* dan *waktunja*. Dalam suatu negara jang ketjil jang berakjat sedikit dan *berbangsa tunggal* maka mungkin susunan pengambilan keputusan dengan suara terbanjak itu dapat dilakukan. Tetapi dalam suatu negara jang besar, jang meliputi permukaan bumi jang luas, dan jang warganegarannya terdiri dari *bangsa bersuku*, sebagai halnya tanah air dan bangsa kita, maka susunan pemerintahan dengan suara terbanjak jang mutlak tidaklah dapat didjalankan dengan adil. "*Segala pikiran tentang pengambilan keputusan dengan suara terbanjak,*" kata Professor Georg Jellinek, "*adalah disandarkan atas adanya kesatuan dikalangan rakjat. . . . Karena itu, apabila kesatuan ini tidak ada, maka pengambilan keputusan dengan suara terbanjak jang hanya didasarkan pada menghitung kepala sadja, tidaklah dapat didjalankan.*" ("Der ganze Gedanke der Mehrheitentscheidung beruht auf der Vorstellung durchgangiger innerer Einheit des Volkes.... Da, wo diese Einheit mangelt, kann auch das auf die reine Kopfzahl gegründete Merhheitsprincip nicht durchgeführt werden." *Das Recht der Minoritäten*, h. 27-28).

Sikap jang menganggap demokrasi itu sama dengan pemerintahan dengan suara-terbanjak sudah begitu umumnja dikalangan masjarakat kita dan telah diterima demikian sadja dengan tiada lagi dikadji hakikatnja jang sesungguhnya, baik dari sudut keadilan, maupun dari sudut moral. Bila sekumpulan manusia jang bekerdjasama terlibat dalam perselisihan - mengenai soal apapun dan

dalam keadaan bagaimanapun djuga, - maka dianggap "keadilan" menghendaki supaya jang diikuti ialah kemauan golongan jang terbanjak, *tidak peduli apa jang mendjadi persoalannya*. Demikian sudah umumnja anggapan ini, sehingga bila ada orang jang meragu-ragukan kebenarannya, akan menimbulkan keheranan di chalajak ramai. . . . jang malas berpikir. Pada hal bila anggapan umum ini dikadji dan dikupas dengan teliti, maka dengan mudah dapat dibuktikan bahwa "hak" golongan terbanjak dalam alam demokrasi itu, sama sekali bukan suatu "hak", tetapi hanya suatu tata-tertib kerdjasama jang pemakaiannya terbatas pada waktu dan tempatnja. "Djadi kita datang lagi pada pokok persoalannya." sebagai kata Herbert Spencer, "bahwa hak sutji parlemen jang berdasarkan pada sangkaan dan hak sutji golongan terbanjak jang berdasarkan pada anggapan itu, adalah tahjul belaka." ("Thus we come round again to the proposition that the assumed divine right of parliaments and the implied divine right of majorities, are superstitions." *The Man Versus the State*, h. 126).

Kembali kepada pokok persoalan kita, maka kini djelaslah sudah betapa akibatnja pemaksaan suatu ideologi negara jang tidak berdasarkan ideologi rakjat - pemaksaan pantjasila atas ummat Islam, - dan pemaksaan negara kesatuan dengan demokrasi "primitive"-nja atas suatu bangsa bersuku. Inilah pangkal segala kekusutan dan ketidak-adilan jang kini sedang terus menimpa masjarakat bangsa kita. Njatalah kekatjauan jang sedalam ini, jang

mengenai dasar-dasar ketata-negaraan, tidaklah dapat diperbaiki lagi hanya dengan menggantikan kabinet si anu dengan kabinet sifolan, sebagai yang dikehendaki oleh Pemerintah Revolusioner di Bukittinggi, umpamanya, atau dengan mendirikan panitia ini dan dewan itu. Yang kita perlukan sekarang ialah suatu Undang Undang Dasar baru yang tidak berdasarkan fantasi, tetapi yang berdasarkan pada kenyataan-kenyataan sosial, politik, ekonomi, ilmu bangsa dan ilmu bumi Indonesia. Suatu Undang Undang Dasar baru yang berdasarkan demokrasi yang sehat, yang dapat melahirkan suatu pemerintahan dengan persetujuan yang diperintahi, yang tidak dapat diperalat oleh sesuatu golongan untuk menindas golongan yang lain, baik golongan terbesar maupun golongan terkecil; tegasnya suatu Undang Undang Dasar baru yang dapat menegakkan keadilan di bumi Indonesia.

Njatalah suatu Undang Undang Dasar yang memenuhi syarat-syarat ini hendaklah, pertama, disendikan pada ideologi rakyat, tegasnya pada Islam, selama lebih 90% rakyat Indonesia masih terdiri dari umat Islam. Dalam pada itu Undang Undang Dasar ini harus menjamin kebebasan dan kemerdekaan yang sama bagi agama-agama lain. Kedua, didasarkan pada pengakuan terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia adalah suatu *bangsa-bersuku* yang masing-masing suku-bangsa mempunyai hak untuk meneruskan kehidupannya menurut agama, kebudayaan, adat-istiadat dan nilai peradabannya masing-masing dengan tidak ada gangguan dari pihak luar.

Dalam lapangan politik ini berarti pula pembagian kembali alam Indonesia kepada sekian banyak daerah-daerah suku-bangsa yang masing-masing akan mempunyai pemerintahan sendiri, sebagai ganti dari pembagian daerah yang sekarang yang dilakukan dengan sewenang-wenang yang didiktekan dari Djakarta dan yang hanya dipakai sebagai alat memetjah dan mendjadjah oleh Sukarno. Ketiga, sebagai akibat dari pada pengakuan terhadap hak luhur suku-suku bangsa untuk mengatur rumah-tangganya masing-masing, maka susunan pemerintahan baru tidak dapat lain melainkan satu *negara persatuan* (federal). Keempat, untuk mentjegah kembalinya demokrasi "primitive" ala Sukarno, dan untuk mendjamin tertjapainya suatu pemerintahan dengan persetujuan dari pada yang diperintahi, maka kekuasaan tertinggi dari negara persatuan itu akan delitakkan dalam dua madjlis yang mempunyai kekuasaan yang sama yang segala undang-undang harus disahkan oleh kedua-duanya. Madjlis-madjlis ini ialah, pertama, Dewan Rakyat, yang pemilihan anggota-anggotanya dilakukan dengan dasar satu wakil untuk tiap-tiap 300,000 rakyat umpamanya. Dengan sendirinya suku-bangsa yang terbesar akan mendapat wakil yang terbanjak pula disini. Kedua, Dewan Kebangsaan, yang pemilihan anggota-anggotanya dilakukan atas dasar dua orang wakil atau lebih dari tiap-tiap suku-bangsa. Dengan demikian demokrasi kita sudah berubah dari demokrasi yang berdasarkan suara terbanjak yang tidak mengenal batas, "simple majority", kepada suatu demokrasi yang berdasarkan pada suara terbanjak yang

terbatas, dimana suara terbanyak dari seluruh rakyat sebagai perseorangan dipersatukan dengan suara terbanyak dari rakyat sebagai suku-suku bangsa; tegasnya suatu demokrasi yang berdasarkan "suara terbanyak berganda" -"concurrent majority". Masing-masing suara terbanyak ini akan membatasi nafsu-nafsu yang keterlaluan dari yang lain. Dewan rakyat akan menjaga kepentingan suku-bangsa yang terbesar, sedang Dewan Kebangsaan akan menjaga kepentingan suku-suku bangsa yang terkecil. Hasilnya suatu pemerintahan yang adil, dimana kekuasaan negara tidak dapat lagi diperalat oleh sesuatu golongan untuk menindas golongan yang lain.

Kelima, untuk menjegah kembalinya demokrasi "primitive" pula, maka tjara pemilihan yang berlaku sekarang-"proportional representation",-haruslah ditukar dengan pemilihan berdasarkan daerah,-"electoral district system", - karena sebagaimana telah pernah kita kemukakan, daerahlah yang lebih tepat untuk dasar perwakilan, karena daerah kediamannjalah yang lebih menentukan kepentingan rakyat; dengan demikian orang-orang yang bisa dipilih menjadi wakil sesuatu daerah haruslah anak daerah itu sendiri yang benar-benar mengetahui kebutuhan daerahnya. Tambahan lagi susunan pemilihan ini akan menolong menjehatkan kepartaian dengan tiada perlu memakai sesuatu paksaan undang-undang yang tertulis yang berupa undang-undang kepartaian, karena susunan ini dengan sendirinya akan mematikan partai-partai kecil dan akan mendorong

perkembangan kearah susunan dua atau beberapa partai saja, yang mana menjadi salah satu syarat untuk menjapai ketenteraman politik dalam suatu negara demokrasi.

Tetapi semua perbaikan-perbaikan ini hanya bisa dilaksanakan dalam suatu negara *persatuan* dan tidak dalam suatu negara *kesatuan* yang memperkosa kenjataan-kenjataan sosial, politik, sedjarah, ilmu bangsa dan ilmu bumi Indonesia. Sesungguhnya untuk kebaikan bangsa kita sendirilah kalau kita sudi mengambil teladan dari kehidupan politik bangsa-bangsa bersuku yang lain di dunia, yang hampir semuanya, mulai dari Switserland yang kecil sampai kepada Amerika Serikat dan Soviet Rusia yang besar, memakai susunan negara persatuan dan menolak susunan negara kesatuan. Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Brazil, Burma, Canada, Djerman Barat, India, Lybia, Malaya, Mexico, Pakistan, Switserland, Soviet Rusia, Venezuela, dan Yugoslavia, semuanya adalah negara-negara persatuan. Djumlah dari rakyat yang mendiami negara-negara persatuan ini hampir seperdua dari penduduk dunia. Disini tergolong negara-negara yang paling maju, besar dan berkuasa didunia. Njatalah bahwa susunan negara persatuan adalah suatu susunan ketatanegaraan yang sedang maju dan yang paling digemari didunia terutama oleh bangsa-bangsa besar dan oleh bangsa-bangsa bersuku.

Oleh karena itu agak menertawakan waktu kita mendengar omong-kosong Sukarno pada waktu pembu-

kaan Dewan Konstituante di Bandung, dimana ia mengatakan bahwa susunan ketatanegaraan persatuan sudah ketinggalan zaman, bahkan dikatakannya "sudah mati" di Indonesia. Kita kuatir bukan susunan ketata-negaraan persatuan-nja jang ketinggalan zaman, sebagai telah kita buktikan diatas, tetapi alam pikiran Sukarno sendirilah jang sebenarnja sudah ketinggalan zaman, dan tidak sanggup lagi melihat kenjataan. "Tjita-tjita negara persatuan," kata Professor John Fischer, "libih hidup dewasa ini dari pada sedjak 150 tahun jang sudah-sudah. Orang-orang jang sadar kepada kenjataan, mulai dari Kambodja sampai ke Strasbourg, kini memperbintjangkannya dengan segala kesungguhan; dalam berlusin-lusin negara, lebih-lebih di Eropah, tjita-tjita negara persatuan sudah berpindah dari lapangan teori politik jang gelap kemedan pergolakan politik jang njata-njata dan menurut masa." ("The idea of federalism is more alive today than at any time in the last 150 years. Practical men are talking about it in serious terms all the way from Cambodia to Strasbourg; in dozens of contries, especially in Europe, it has moved from the shadowy realm of political theory into the harsh arena of current politics." "Prerequisites of Balance," *Federalism, Mature and Emergent* (ed. A. W. Macmahon), h. 58).

Dengan mengambil sikap jang demikian tadjamnja, dan bodohnja, maka Sukarno telah menutup segala pintu penjelesaian setjara damai dan mendjadikan dirinja sebagai penghalang jang terbesar dari tertjapainja suatu

penjelesaian jang adil dan bidjaksana dari segala kekusutan politik jang telah menimpa bangsa Indonesia dewasa ini, sebagai akibat jang langsung dari pada politiknya sendiri.

BAGIAN KEDUA

IV

NEGARA PERSATUAN DAN KEBAIKANNJA

Kenjataan-kenjataan mengenai bumi kita, bangsa kita, kebudajaan kita, ekenomi dan politik kita, dengan sendirinja membatasi kita dalam memilih bentuk ketatanegaraan jang sesuai dengan keseluruhankehidupan masjarakat kita. Memonjeti bentuk dan susunan tatanegara bangsa lain dengan tiada mengindahkan kenjataan-kenjataan diatas hanja akan membawa malapetaka kepada bangsa kita sendiri. Demikian pula halnja memaksakan sesuatu bentuk ketatanegaraan dengan tiada mengindahkan kenjataan-kenjataan diatas, sebagaimana halnja dengan pemaksaan negara kesatuan jang sekarang jang hanja berdasarkan pada slogan-slogan dan bukan pada kenjataan itu.

Oleh karena kenjataan-kenjataan diatas dan sebagaimana telah kita buktikan pula dibelakang, maka suatu pemerintahan demokrasi jang sehat, yakni pemerintahan dengan persetujuan dari jang diperintahi, tidaklah dapat didirikan dibumi Indonesia dalam bentuk negara kesatuan sebagai sekarang. Demokrasi sebagai didjalankan dalam negara kesatuan sekarang memungkinkan terdirinja satu pemerintahan oleh satu suku bangsa Jang terbesar atas seluruh suku-suku bangsa Jang...

jang lain walaupun dengan tiada persetudjuan mereka. Atau lebih tegas lagi, negara kesatuan memungkinkan perampasan legal terhadap hak politik dan hak kemerdekaan dari sebagian rakjat Indonesia dan memungkinkan didjalankannya pemerintahan negara oleh satu suku bangsa sadja, jaitu oleh satu suku jang terbesar atas seluruh suku-suku bangsa jang lain, walaupun dengan tiada persetudjuan mereka jang terachir itu. Tindjauan ini sama sekali tidak penulis maksudkan sebagai satu tjelaan terhadap suku bangsa Djawa karena hal jang sematjam itu bisa djuga terdjadi dengan sesuatu suku bangsa jang lain, andainja jang lain itu jang mendjadi golongan jang terbanjak dalam susunan ini. Sekali lagi hal ini bukan kesalahannya suku bangsa Djawa, tetapi kesalahan suatu sistem dan mereka jang memaksakannya. Hal jang sedemikian itu njata-njata tidak adil dan karena itu tidak akan dapat dipertahankan terus-menerus.

Mengingat anasir-anasir bumi, bangsa, sedjarah, kebudajaan, politik dan ekonomi kita jang tidak mengenal kesatuan itu, maka satu-satunya bentuk ketatanegaraan jang dapat memenuhi kebutuhan kita semua, dengan keadilan kepada semua pula ialah bentuk negara *persatuan* (federal). Hanja dengan melalui bentuk ketatanegaraan persatuanlah suatu demokrasi jang sehat, yakni, pemerintahan dengan persetudjuan dari jang diperintahi, akan di Indonesia.

persatuan menghendaki dan berdirinja satu pemerintahan dengan

persetudjuan jang sepenuh-penuhnja dari jang diperintahi sambil mendjamin keadilan kepada segala golongan rakjat, baik golongan besar, maupun golongan ketjil. Di Indonesia, tata-negara persatuan akan memungkinkan berdirinja satu pemerintahan jang politiknja dikendalikan dengan persetudjuan seluruh suku-suku bangsa Indonesia dan bukan hanja satu pemerintahan jang politiknja dikendalikan hanja oleh suku bangsa Djawa semata-mata sebagai dalam pemerintahan negara kesatuan sekarang ini. Tata-negara persatuan akan mengembalikan hak luhur suku-suku bangsa Madura, Sunda, Minangkabau, Bali, Batak, Bugis, Minahasa, Maluku, Atjeh, dan sebagainya, jang selama ini sudah dihanjutkan dalam arus demokrasi "primitive" negara kesatuan, dan jang selama ini deradjat mereka sebenarnja sudah diturunkan mendjadi warganegara kelas dua jang suara mereka tidak turut lagi menentukan haluan politik negara, bahkan tidak turut lagi menentukan nasib mereka sendiri. Semua ini dapat tertjapai karena tata-negara persatuan tidak menghendaki dimonopolinja segala kekuasaan, dan dengan sendirinja djuga faedah faedah dari kekuasaan itu, oleh pemerintah pusat semata-mata sebagai halnja dalam negara kesatuan. Negara persatuan membagi-bagi segala kekuasaan dan dengan sendirinja djuga faedah-faedah dari kekuasaan itu, kepada daerah-daerah atau golongan-golongan jang berhak mempunjainja. Demikian pula pemerintah pusat negara persatuan tidak mengambil segala keputusan dengan sesuka hati orang-orang jang kebetulan memegangnja sebagaimana halnja dengan

pemerintah pusat negara kesatuan sekarang, tetapi pemerintah pusat negara persatuan, dalam segala keputusannya, harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan dari sebagian besar daerah-daerah atau sebagian besar suku-suku bangsa kita. Jadi tatanegara persatuan memungkinkan kerdjasama yang jujur lagi adil dalam negara-negara yang rakyatnya terdiri dari bangsa bersuku atau bergolongan-golongan.

Sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan politik dan memungkinkan berlakunya demokrasi dalam masyarakat-masyarakat besar seperti masyarakat kita, maka susunan tatanegara persatuan telah menjelma kedua. Tepat benarlah apa yang dikatakan oleh Mr. Justice Frankfurter, anggota Mahkamah Agung Amerika Serikat, bahwa "pemerintahan negara persatuan itu bukanlah dilahirkan oleh ilmu politik, tetapi dihasilkan oleh tekanan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat." ("Federal governments are not the offspring of political science; they are the product of economic and social pressure." Roy F. Nichols, "Federalism versus Democracy," *Federalism as a Democratic Process* (Roscoe Pound, ed.) h. 50). Dan sebagai dikatakan oleh Professor John Fischer, "tujuan dari pada negara persatuan ialah untuk memperpadukan kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dari peradaban yang berlain-lainan, dari adat istiadat yang berbeda-beda, dari kebutuhan-kebutuhan ekonomi yang tidak sama, dari bangsa-bangsa yang berlainan dan dari agama-agama yang berbeda-beda

dalam satu susunan yang akan dapat memenuhi kebutuhan semua." ("Its aim is to harmonize the diverse interests of widely, various cultures, traditions, economics, races, and religions into a framework which will serve their common needs." John Fischer, "Prerequisites of Balance", dalam *Federalism, Mature and Emergent* h. 60). Oleh karena itu pula maka diantara puluhan negara-negara persatuan yang terdapat didunia, tak ada dua diantaranya yang bersusunan sama antara satu dengan yang lainnya. Semua tata-negara negara-negara persatuan itu disesuaikan dengan keadaan alam dan keadaan bangsanjamasing-masing. Oleh karena itu pula, untuk menghemat tempat dan waktu, maka disini kita tidak akan meninjau susunan ketatanegaraan negara-negara persatuan yang lain ketjuali sekedar perbandingan dimana perlu.

Dibawah ini penulis akan mentjaba menguraikan pendapatnya mengenai soal-soal pokok yang harus dilaksanakan dan yang harus menjadi syarat pembentukan satu negara persatuan Indonesia: syarat-syarat yang akan menyesuaikan bentuk ketatanegaraan persatuan itu dengan kenyataan alam, keadaan bangsa dan kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya.

A. Pembagian Daerah Pemerintahan

Pembagian daerah pemerintahan negara bukanlah hanya persoalan tata-usaha belaka. Ini adalah suatu